

P-RENJA TAHUN 2024

Jl. Veteran No 10 Kota Blitar, Jawa Timur
Website : <https://dpmptsp.blitarkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

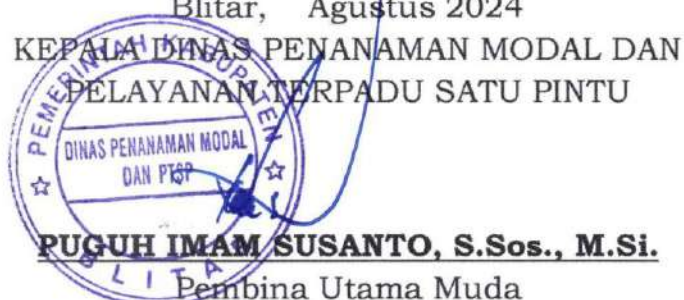
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna memenuhi kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik maka perlu kiranya disusun P-Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dan evaluasi pada program/kegiatan tahun anggaran 2023 dan 2024 sampai dengan triwulan II. Dengan disusunnya P-Renja 2024 tersebut maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan telah tersusunnya P-Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam mengemban tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati yang telah ditetapkan.

Blitar, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701111 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	7
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	9
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Rencana Kerja.....	24
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	24
3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	25
3.2 Pendanaan.....	29
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

P-Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. P-Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. P-Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena P-Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. P-Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan P-Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan P-Renja PD dimulai dengan persiapan evaluasi pada P-Renja PD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi P-Renja PD tahun berjalan.

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan P-RKPD sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki P-Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada P-RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

P-RKPD Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. Sesuai amanat tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun P-Renja PD tahun 2024. P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan DPMPTSP yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan P-RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2024.

Keterkaitan P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam P-Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan P-RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
 20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
 21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E);
 22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2039;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam perencanaan PD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam P-Renja PD dan RKA-P PD. Sedangkan Tujuan penyusunan P-Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara P-Renja PD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada PD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi P-Renja PD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Pendanaan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Kemendagri No 18 Tahun 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan urusan penanaman modal. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut merupakan sasaran strategis dan program yang dilaksanakan DPMPSTP Kabupaten Blitar pada tahun 2024:

1. Sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sasaran ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Sasaran ***Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPSTP Kabupaten Blitar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan II dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 belum rilis dari Tim Evaluator. Sementara tahun 2023 target Nilai dan Predikat SAKIP 79,75 dan predikat BB terealisasi 75,21 dengan predikat BB capaiannya adalah 94,30%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2024 dengan target 89 terealisasi 90,06 sampai dengan triwulan II; sedangkan IKM pada tahun 2023 dengan target 87 terealisasi 89,53 dengan tingkat capaian 102,90%.
3. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar Tahun 2024 dengan target 20% sampai dengan triwulan II sebesar 41,42% dengan investasi 2.042 Miliar sehingga total akumulasi realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan 2024 triwulan II sebesar 16.745 Miliar; Sedangkan di tahun 2023 dengan target 20% terealisasi 69,82% dengan tingkat capaian 349,10%.

Tabel 2.1.1

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET 2024	REALISASI 2024 sd TW II
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,50 dan A	80 dan BB	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	93	89	90,06
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	20%	41,42%

Tabel 2.1.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal		Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	9700 M	13500 M	18200 M	21700 M	11774 M	14702 M	18200 M	21700 M	Tahun 2024 s/d TW II : 16745 M

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengevaluasi realisasi kinerja tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2024 sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD.

DPMPTSP mendukung **Misi Bupati yang ketiga** yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dan **Misi Bupati yang keempat** yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Indikator Kinerja Utama yang ada di DPMPTSP sudah mendukung pencapaian Misi Bupati.

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama ada beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan target yang direncanakan tidak tercapai. **Pada Tahun 2024 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :**

- 1) Ada beberapa dokumen yang belum sesuai sehingga mempengaruhi Nilai SAKIP menurun;
- 2) Integrasi sistem Kementerian dalam OSS sering bermasalah sehingga menghambat pelayanan;
- 3) Setiap perubahan implementasi OSS tidak disosialisasikan oleh BKPM ke daerah dengan jelas sehingga mengundang permasalahan dengan pelaku usaha;

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- 1) Melakukan perbaikan dan pemenuhan dokumen SAKIP;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan masalah dengan BKPM;
- 3) Terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi IT dalam memperlancar perizinan;
- 4) Terus melakukan koordinasi dan peningkatan SDM yang dilakukan secara virtual atau online;

Isu Strategis Tahun 2024:

- 1) Potensi wisata alam dan buatan;
 - 2) Potensi SDM (angkatan kerja tinggi);
 - 3) Potensi Sumber Daya Alam (Kelapa dll);
-

- 4) JLS sudah terhubung dari Pantai Tambak-Kecamatan Wonotirto ke Pantai Serang-Kecamatan Panggungrejo;
- 5) Rencana pembangunan TOL;

Permasalahan:

- 1) Letak geografis Kabupaten Blitar tidak berada pada jalur utama perdagangan dan industri;
- 2) Masyarakat Kabupaten Blitar tidak terlalu antusias terhadap industri besar.

Prioritas Pembangunan Tahun 2024:

- 1) Meningkatkan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata;
- 2) Meningkatkan Promosi Investasi di Bidang Industri Ramah Lingkungan.

Langkah-langkah/strategi Tahun 2024:

- 1) Menyusun IPRO sektor pariwisata, IPRO sektor Industri berbasis dasar Sumber Daya Alam yang potensial di Kabupaten Blitar seperti Pohon Kelapa menjadi Gula Palem;
- 2) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (Bappeda Litbang, Disperindag, Dinkop, Disnaker, Dinas Pertanian) untuk menyusun perencanaan peta investasi dan software pendukung (peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dan perencanaan investasi);
- 3) Meningkatkan Promosi Investasi;
- 4) Meningkatkan Kemudahan Berusaha.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan penanaman modal melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mendapat pagu sebesar Rp. 6.817.562.942,- sampai dengan triwulan II realisasi sebesar Rp. 2.402.466.966,- atau 35,24%. Dengan demikian jumlah pagu anggaran yang belum diserap sebesar Rp. 4.415.095.976,-, atau 64,76%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan. Kegiatan rehab gedung sedang dalam proses pekerjaan untuk masa waktu pekerjaan samapai dengan triwulan III;
2. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal belum terealisasi untuk output program dan kegiatannya karena peraturan daerah penanaman modal belum disahkan. Untuk kegiatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi dalam proses peyusunan IPRO;
3. Program Promosi Penanaman Modal belum terealisasi karena dilaksanakan pada triwulan III untuk kegiatan promosi;
4. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 0,79% dengan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 7.384 izin sedangkan jumlah izin yang terlayani sebesar 7.674 izin;
5. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilaksanakan sesuai target untuk pelaksanaan monev pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan atau pelaku usaha. Untuk realisasi investasi pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 2.042 Miliar. Sehingga jumlah realisasi investasi dari tahun 2017 sd. Tahun 2024 triwulan II adalah sebesar 16.745 Miliar (dengan rincian realisasi investasi sd. 2023 sebesar 14.702 Miliar);
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sudah disusun dokumen laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada semester I.

Tabel 2.3

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2024 s/d Triwulan II**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				5		6		7		8		9		10				11		12		13		14		15										
				Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp				Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Kr		Rp						
				100		35.853.876.785		100		-		100		4.873.569.201				57,14		484.638.993		1.508.283.479		57,14		1992922.472		57,14		40,8924.6279		157,14		1992922.472		157,14
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	35.853.876.785	100	-	100	4.873.569.201	57,14	484.638.993	1.508.283.479					57,14	1992922.472	57,14	40,8924.6279	157,14	1992922.472	157,14	5,55845.741	1992922.472	DPMPPTSP										
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	79	83.965.900	48	-	16	1.998.000	8	-	0					8	0	50	0	56	0	70,886.076	0	0	DPMPPTSP										
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	50	48.775.900	30	-	10	1.110.000	5	-	0					5	0	50	0	35	0	70	0	0	DPMPPTSP										

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	Rp	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	35.190.000	18	-	6	888.000	3	-	0					3	0	50	0	21	0	70	0	0	DPMPSTP	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	10	18.494.072.663	6	-	2	3.378.772.942	0	365.102.379	1	1.154.803.896				1	1519906275	50	44,98397202	7	1519906275	70	8,21834272	1519906275	DPMPSTP	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	18.300.845.013	113	-	30	3.349.972.942	19	365.102.379	0	1.147.753.896				19	1512856275	63,333333	45,16025357	132	1512856275	88	8,26659247	1512856275	DPMPSTP	
		Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	193.227.650	36	-	12	28.800.000	3	-	3	7.050.000				6	7050000	50	24,47916667	42	7050000	70	3,64854616	7050000	DPMPSTP	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30	2.188.993.322	25	-	30	161.743.828	0	-	18	133.740.000				18	133740000	60	82,68630813	43	133740000	143,333333	6,10965774	133740000	DPMPSTP	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	-	1	72.543.828	0	-	1	65.340.000				1	65340000	100	90,06968863	1	65340000	#DIV/0!	#DIV/0!	65340000	DPMPSTP	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				5		6		7				8		9		10		11		12		13		14		15											
				Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Kr		Rp		15=(14/5) *100 (Ki & Kr) Rp=14			
				I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12																					
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	0	0	7	-	25	89.200.000	0	-	18	68.400.000					18	68400000	72	76,68161435	25	68400000	#DIV/0!	#DIV/0!	68400000	DPMPTSP										
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	60	2.188.993.322	36	-	12	294.859.463	3	15.525.900	3	55.333.190					6	70859090	50	24,03147902	42	70859090	70	3,23706287	70859090	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	97.000.000	3	-	1	4.281.270	1	-	0	2.443.000					1	2443000	100	57,06250715	4	2443000	80	2,5185567	2443000	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	460.336.000	3	-	2	105.130.624	1	7.402.000	0	12.484.000					1	19886000	50	18,915516	4	19886000	80	4,31988808	19886000	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	112.000.000	3	-	1	6.314.013	1	1.217.400	0	1.204.600					1	2422000	100	38,3591228	4	2422000	80	2,1625	2422000	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	54.075.000	3	-	1	8.178.556	1	-	0	1.222.500					1	1222500	100	14,94762645	4	1222500	80	2,26074896	1222500	DPMPTSP										

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				5		6		7				8		9		10		11		12		13		14		15											
				Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Kr		Rp					
				1800		24.082.235		1080		-		360		2.352.000		90		314.000		90		396.000		180		710000		50		30,18707483		1260		710000		70	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1800	24.082.235	1080	-	360	2.352.000	90	314.000	90	396.000					180	710000	50	30,18707483	1260	710000	70	2,94823134	710000	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	1.441.500.087	220	-	75	168.603.000	19	6.592.500	21	37.583.090					40	44175590	53,333333	26,20095135	260	44175590	86,666667	3,06455687	44175590	DPMPTSP										
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	4.951.055.000	12	-	4	194.800.116	0	-	0	-					0	0	0	0	12	0	60	0	0	0	DPMPTSP									
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	40	2.000.000.000	24	-	5	18.689.070	0	-	0	-					0	0	0	0	24	0	60	0	0	0	DPMPTSP									
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	42	2.951.055.000	37	-	10	176.111.046	0	-	0	-					0	0	0	0	37	0	88,095238	0	0	0	DPMPTSP									
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	3.095.050.000	36	-	12	429.894.852	3	77.503.041	3	132.985.818					6	210488859	50	48,96287034	42	210488859	70	6,80082257	210488859	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	24.250.000	6	-	2	2.842.350	0	641.500	1	-					1	641500	50	22,56935282	7	641500	70	2,64536082	641500	DPMPTSP										

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15													
				Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp							
				10		595.000.000		6		-		2		79.796.502		0		18.985.541		1		17.233.818		1		36219359		50		45,38965756		7		36219359		70	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10	595.000.000	6	-	2	79.796.502	0	18.985.541	1	17.233.818					1	36219359	50	45,38965756	7	36219359	70	6,08728723	36219359	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	10	2.475.800.000	6	-	2	347.256.000	0	57.876.000	1	115.752.000					1	173628000	50	50	7	173628000	70	7,0130059	173628000	DPMPTSP										
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	5.925.239.900	36	-	12	411.500.000	3	26.507.673	3	31.420.575					6	57928248	50	14,07733852	42	57928248	70	0,97765236	57928248	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25	920.810.000	15	-	5	105.810.000	3	13.442.673	2	12.895.248					5	26337921	100	24,8917125	20	26337921	80	2,86029919	26337921	DPMPTSP										
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	400	384.429.900	260	-	100	70.690.000	25	13.065.000	20	9.607.327					45	22672327	45	32,0728915	305	22672327	76,25	5,89764922	22672327	DPMPTSP										

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	Rp	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	4.620.000.000	6	-	2	235.000.000	0	-	0	8.918.000					0	8918000	0	3,794893617	6	8918000	60	0,1930303	8918000	DPMPSP
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02	1.973.035.030	0	-	0,02	282.655.892	0	-	0	5.830.000					0	5830000	0	2,062578621	0	5830000	0	0,29548386	5830000	DPMPSP
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	10	568.912.299	0	-	2	58.362.192	0	-	0	1.330.000					0	1330000	0	2,278872596	0	1330000	0	0,23377944	1330000	DPMPSP
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	423.529.466	0	-	1	-	0	-	0	0					0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	DPMPSP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	Rp	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	0	0	-	1	37.030.800	0	-	0					0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	DPMPTSP		
		Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2	0	0	-	1	21.331.392	0	-	0	1.330.000				0	1330000	0	6,23494238	0	1330000	0	#DIV/0!	1330000	DPMPTSP	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	10	1.404.122.731	2	-	2	224.293.700	0	-	0	4.500.000				0	4500000	0	2,006297992	2	4500000	20	0,32048481	4500000	DPMPTSP	
		Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5	929.722.731	5	-	2	224.293.700	0	-	0	4.500.000				0	4500000	0	2,006297992	5	4500000	100	0,48401527	4500000	DPMPTSP	
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	10	3.180.435.117	6	-	2	440.496.249	0	-	0	-				0	0	0	0	6	0	60	0	0	DPMPTSP	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	50	3.180.435.117	34	-	10	440.496.249	0	-	1	-				1	0	10	0	35	0	70	0	0	DPMPTSP	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15								
				Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		Ki		Rp		
				10		2.457.659.268		6		-		2		440.496.249		0		-		0		-		0		-		0		0		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10	2.457.659.268	6	-	2	440.496.249	0	-	0					0	0	0	0	6	0	60	0	0	DPMPTSP						
		Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5	722.775.849	0	-	1	-	0	-	0					0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	DPMPTSP						
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5	2.031.371.005	35,29	-	5	476.919.080	7,62	103.110.000	7,62	126.635.815			15,24	229745815	304,8	48,17291332	50,53	229745815	1010,6	11,3098895	229745815	DPMPTSP							
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5	2.031.371.005	32,75	-	5	476.919.080	8,1	103.110.000	8,1	126.635.815			16,2	229745815	324	48,17291332	48,95	229745815	979	11,3098895	229745815	DPMPTSP							

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	Rp	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50000	828.481.705	42.662	-	10.000	449.157.972	4122	103.110.000	4122	122.315.815			8244	225425815	82,44	50,18853701	50906	225425815	101,812	27,2095103	225425815	DPMPTSP		
		Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	920.000.000	15555	-	5	15.241.220	0	-	2	1.760.000			2	1760000	40	11,54763201	15557	1760000	62228	0,19130435	1760000	DPMPTSP		
		Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250	282.889.300	4802	-	50	12.519.888	362		362	2.560.000			724	2560000	1448	20,44746726	5526	2560000	2210,4	0,90494762	2560000	DPMPTSP		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	Rp	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125	1.251.865.274	115	-	25	185.956.000	0	-	20	19.252.068					20	19252068	80	10,3530233	135	19252068	108	1,5378706	19252068	DPMPTSP
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase data yang tersedia tepat waktu	100	812.744.223	100	-	100	113.350.520	0	-	50	1.430.000					50	1430000	50	1,261573392	150	1430000	150	0,17594711	1430000	DPMPTSP
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	10	812.744.233	6	-	2	113.350.520	0	-	0	1.430.000					0	1430000	0	1,261573392	6	1430000	60	0,17594711	1430000	DPMPTSP

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar menjadi dokumen rencana tahunan yang memuat rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar disusun dengan merujuk pada dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Sesuai rencana pembangunan daerah dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026 yaitu: *“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR”*.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas;
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan;

Dari 4 (empat) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah mengacu pada misi ketiga dan keempat.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target
Meningkatkan Iklim Investasi di Kabupaten Blitar		ICOR	5,75
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80 dan BB
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	89
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Blitar, beberapa strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online;
- 3) Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai;
- 4) Penerapan Kebijakan;
- 5) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
- 6) Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Blitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2

Indikator Kinerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2024	P-RENJA 2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 Dokumen	16 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	25 Orang/bulan	50 Orang/bulan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2024	P-RENJA 2024
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	100 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	4 Jenis
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	7 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	16 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	80 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0,02%
	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Investor	2 Investor
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2024	P-RENJA 2024
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	2 Sektor Usaha
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	10 Kali	2 Kali
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	5%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	5%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	10.000 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	50 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	13.700 Milyar	18.200 Miliar
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang dilaporkan melalui LKPM	345 Proyek	345 Proyek
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	10 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
			RENJA 2024	P-RENJA 2024
	merealisasikan Kegiatan Usahanya	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	10 Dokumen

3.2 Pendanaan

Pada perubahan anggaran tahun 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar merencanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.686.549.900,- (*Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dengan rincian DAU/APBD Murni sebesar Rp. 6.091.292.900,- (*Enam Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 595.257.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Blitar. Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai data yang terinput pada SIPD-RI.

Tabel 3.2
**Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu berdasarkan P-
 RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.521.500.001
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 Dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	2.648.359.900
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	2.619.559.900
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.800.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	30 Orang/Bulan	296.774.902
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	66.142.902
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang/bulan	230.632.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	355.859.428
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4.281.270
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	107.936.374
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.871.228
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	8.178.556
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	2.352.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	221.240.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	221.582.196

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	7 Unit	18.689.070
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	202.893.126
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	430.216.062
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.164.750
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	79.795.312
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	347.256.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	568.707.513
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	105.810.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	81.900.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	380.997.513
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	262.964.500
	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Investor	38.670.800
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	37.030.800
	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1.640.000
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 Dokumen	224.293.700
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	224.293.700
3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 Sektor Usaha	56.852.955

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	2 Kali	56.852.955
	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56.852.955
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	1.089.821.069
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	1.089.821.069
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	1.058.059.521
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	17.240.774
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	14.520.774
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	18.200 Miliar	655.532.000
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang dilaporkan melalui LKPM	345 Proyek	655.532.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha	98.488.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	356.118.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	200.926.000
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100.479.375

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 Laporan	100.479.375
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	100.479.375
TOTAL PAGU ANGGARAN				6.687.149.900

BAB IV

P E N U T U P

Keberhasilan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai pihak. Sebagai uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja PD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada P-Renja tahun 2024 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan cakupan layanan dan kualitas pelayanan pada masyarakat Kabupaten Blitar dengan strategi memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dan berizin di Kabupaten Blitar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701111 198903 1 004

